



Buletin

# Isen Mulang

Edisi, 301  
November 2019

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah



**Pelindung :**

Gubernur Kalimantan Tengah

**Penasehat :**

Sekretaris Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Pengarah :**

Asisten Administrasi Umum  
Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

**Penanggung Jawab:**

Kepala Biro Protokol dan Komunikasi  
PUBLIK Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Pemimpin Redaksi:**

Kepala Bagian Penyaringan Informasi  
dan Publikasi pada Biro Protokol  
dan Penyaringan Informasi dan  
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Sekretaris Redaksi:**

Kepala Sub Bagian Informasi  
Pemerintahan dan Umum pada Biro  
Protokol dan Penyaringan Informasi dan  
Publikasi Sekretariat Daerah  
Provinsi Kalimantan Tengah

**Wakil Sekretaris Redaksi:**

Kepala Sub Bagian Media dan  
Dokumentasi pada Biro Protokol  
dan Penyaringan Informasi dan  
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Koordinator Distribusi :**

Kepala Sub Bagian Informasi  
Ekonomi, Pembangunan dan  
Kesejahteraan Rakyat Biro Protokol  
dan Penyaringan Informasi dan  
Publikasi Sekretariat Daerah Provinsi  
Kalimantan Tengah

**Staf Pelaksana :**

Mulyani, S.Sos, Eka Supriyaningsih,  
Joko Prabowo, Nova Anggreni, Benito  
Zuares

**Alamat Redaksi :**

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya  
Telp/Fax (0536) 4200241

**Ijin Penerbitan Khusus**

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

## **Daftar Isi :**

Kalteng Rumuskan Komitmen Bersama Penanganan  
dan Pencegahan Karhutla\_\_\_\_3

Dinas KP Kalteng Kampanyekan Gemar Makan  
Ikan\_\_\_\_4

Pemprov Kalteng Terima Penghargaan Kemenkeu RI  
Atas Opini WTP\_\_\_\_5

Pimpinan DPRD Kalteng Periode 2019-2023 Ucapkan  
Sumpah\_\_\_\_6

Gubernur Kalteng : P3MD Sebagai Instrumen  
Keberhasilan Pembangunan\_\_\_\_6

Sekda : Kepala OPD Harus Aktif Lakukan Monitoring  
dan Evaluasi\_\_\_\_7

Sugianto Sabran : ASN Harus Mengikuti Era  
Digitalisasi 4.0\_\_\_\_8

Sugianto Sabran : Kelola Pemerintahan Perlu ASN  
Berkarakter\_\_\_\_8

Sekda Kalteng Minta Pemda Kawal Alokasi Pupuk  
Bersubsidi\_\_\_\_9

Sugianto : Dewan Harus Miliki Kemampuan Mernyusun  
Regulasi Strategis\_\_\_\_9

Pemprov Kalteng dan Elite Agro Uni Emirat Arab  
Tandatangani Letter of Intent\_\_\_\_10

Pemprov dan DPRD Kalteng Tandatangani 2 Nota  
Kesepahaman\_\_\_\_11

Komisi IV DPR : Relawan Pemadam Api Harus Jadi  
Relawan Pencegah Api\_\_\_\_11

September, Kalteng Inflasi (- 0,07 %)\_\_\_\_12

Jelang Natal dan Tahun Baru, Bupati dan Walikota  
Diminta Hidupkan Pasar Penyeimbang\_\_\_\_12

Pemprov dan BPKP Kalteng Luncurkan Sistem  
Supervisi Rumah Sakit\_\_\_\_13

Gubernur Kalimantan Tengah Selaku Ketua Mabida  
Gerakan Pramuka pada Upacara Pembukaan Kemah  
Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Berkah Tingkat  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019\_\_\_\_14

Alumni Perguruan Tinggi Diharapkan Berkontribusi  
Pada Pembangunan\_\_\_\_15

Pemprov Kalteng dan UPR Tanda Tangani Nota  
Kesepakatan Bidang Pendidikan\_\_\_\_16

Ketua TP PKK Kalteng : Jangan Ada Lagi Diskriminasi  
Anak Berkebutuhan Khusus\_\_\_\_17

Ivo Sugianto Sabran Tegaskan Tak Ada Labelling Pada  
Anak-anak Binaan LPKA\_\_\_\_17

Aisyiyah Diharapkan Ambil Bagian dalam Wujudkan  
Kalteng Berkah\_\_\_\_18

Wagub Temui Pengunjuk Rasa Menentang Penutupan  
Ruas Jalan Di Barito Timur\_\_\_\_19

PT.IJTS Pastikan Perbaikan Fender Jembatan  
Kalahien Akhir Oktober 2019\_\_\_\_19



biropkp.kalteng.go.id



sekretariat.daerah.kalteng



@biropkp\_kalteng



protokol komunikasi publik kalteng



buletin.isenmulang@gmail.com

## Kalteng Rumuskan Komitmen Bersama Penanganan dan Pencegahan Karhutla.



Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah merumuskan komitmen bersama terhadap upaya pencegahan, serta kesiapsiagaan dan penanganan darurat Karhutla 2020.

Terkait kedua hal tersebut, kita akan banyak mendengarkan apa yang disampaikan Bupati dan Walikota, juga arahan pemerintah pusat. Pada Rakor ini kita juga merumuskan komitmen bersama terkait dengan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat Karhutla 2020. Komitmen bersama ini yang akan menjadi acuan dalam tahun 2020 sekaligus sebagai dasar evaluasi tahun 2020. Karena itu saya mengharapkan Saudara Bupati dan Walikota dapat menyampaikan apa yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2019 sehingga dapat dirumuskan penyelesaiannya untuk tahun 2020”, ungkap Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di depan peserta Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan Strategi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana Karhutla Tahun 2019 di Aula Eka Hapakat, Senin (04/11/19).

Sugianto Sabran pada Rakor tersebut menekankan beberapa hal antara lain bagaimana upaya - upaya memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla 2020 yang dimulai sejak

Januari 2020 serta penetapan keadaan darurat bencana Karhutla secara tepat mulai dari siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat.

Pemerintah Kabupaten dan Kota yang belum ada pedoman dalam penetapan keadaan darurat bencana Karhutla agar segera diselesaikan sehingga tahun 2020 tidak lagi ragu-ragu dalam menetapkan keadaan darurat, termasuk serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan Karhutla melalui anggaran murni maupun anggaran darurat.

Pemerintah provinsi akan mengevaluasi alokasi anggaran untuk penanganan Karhutla kepada setiap Kabupaten terutama pada daerah-daerah gambut. “Kepada Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Fahrizal Fitri selaku Ketua TAPD agar ini menjadi perhatian dan kepada Kabupaten dan Kota yang mengalokasikan anggaran Karhutla yang tidak memadai agar dikembalikan”, tegas Sugianto.

Gubernur Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat Karhutla dalam upaya penanganan Karhutla di Kalimantan Tengah tahun 2019. Penetapan status siaga Karhutla itu mulai tanggal 28 Mei s.d 26 Agustus 2019 dan diperpanjang lagi hingga 30 Oktober 2019. Berdasarkan evaluasi terhadap kondisi yang ada sehingga terhitung 17 September s.d 30 September 2019 statusnya dinaikkan menjadi tanggap darurat.

Selanjutnya sejak 1 s.d 30 Oktober 2019 diturunkan menjadi transisi darurat ke pemulihan.

Penanganan Karhutla adalah tanggap jawab bersama seluruh pihak untuk bersinergi secara positif. Pemerintah Daerah memastikan semua berperan sesuai dengan tanggung jawab dan kapasitas yang dimilikinya.

“Jangan tunggu ada kejadian kebakaran baru mulai bergerak. Personil reaksi cepat penanganan Karhutla dimantapkan dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai, optimalkan keterlibatan masyarakat yang selama ini sudah dilatih, lengkapi alatnya dan sediakan anggaran operasionalnya sehingga mereka bisa mendukung reaksi cepat jika ada kejadian kebakaran, jangan biar kejadian kebakaran membesar baru ditangani, sedini mungkin dipadamkan”, tegas Gubernur.

Tahun 2019 tercatat Palangka Raya, Kotawaringin Timur dan Barito Selatan menetapkan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, sedangkan Kabupaten lainnya menetapkan status siaga darurat kecuali Kabupaten Barito Timur dan Sukamara tidak menetapkan status siaga darurat.”Terkait dengan kondisi tahun 2020 yang disampaikan pada rapat BNPB tanggal 9 Oktober 2019 adanya analisa bahwa tahun 2020 bahaya Karhutla lebih besar ancamannya dibanding 2019. Untuk itu diperlukan kesiapsiagaan terhadap Karhutla”, tambah Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Darliansyah.

Rakor ini merupakan rangkaian penanganan dan evaluasi Karhutla 2019 sekaligus memantapkan strategi tahun 2020 terkait dengan kesiapsiagaan dan penanganan keadaan darurat Karhutla dengan peserta terdiri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Walikota/Wakil Walikota dan Bupati/Wakil Bupati serta BPBD se Kalimantan Tengah termasuk Media Massa dan Lembaga Masyarakat.\*\*\*

## Dinas KP Kalteng Kampanyekan Gemar Makan Ikan

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Pemerintah berupaya meningkatkan konsumsi ikan masyarakat untuk menekan angka stunting dan mencetak sumber daya manusia berkualitas melalui berbagai kegiatan yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Ikan Nasional (HARKANAS) Ke-6 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2019 di Halaman Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, Minggu (17/11/2019).

Kegiatan bertema "Konsumsi Ikan Meningkatkan Daya Saing Kalteng" tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Fahrizal Fitri menegaskan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat terutama protein menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. "Berbagai upaya terus dilakukan yang salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ikan sebagai bahan pangan yang dapat mencegah permasalahan gizi anak-anak atau stunting," jelas Gubernur.

Dijelaskan, Angka Konsumsi Ikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017-2018 menunjukkan trend kenaikan. Tahun 2017 sebesar 47,63 per kapita per tahun atau di atas Angka Konsumsi Ikan Nasional yakni sebesar 47,12 per kapita per tahun. Tahun 2018 Angka Konsumsi Ikan Provinsi Kalimantan Tengah naik menjadi 48,19 per kapita per tahun.

Sugianto Sabran berharap Peringatan HARKANAS 2019 dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kandungan gizi dan manfaat ikan, menumbuhkan kreativitas dalam mengolah ikan untuk keperluan konsumsi dan usaha kuliner sebagai sumber pendapatan keluarga serta mendekatkan

ikan kepada masyarakat. "Ikan juga diharapkan menjadi sumber protein yang selalu hadir dalam menu keluarga guna meningkatkan produktivitas dan daya saing Kalimantan Tengah yang sehat, cerdas dan kuat," imbuhnya

Gubernur juga mengapresiasi launching situs "Geoportal Laut Berkah" aplikasi inovasi daerah yang merupakan hasil karya tim kreatif pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama volunteer perikanan. Aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah semua pemangku kepentingan mengakses data dan informasi tata ruang laut atau RZWP3K serta mempermudah calon investor untuk mengurus izin lokasi perairan dan izin pengelolaan perairan Kalimantan Tengah. "Saya berharap agar geoportal laut berkah ini menjadi instrument keterbukaan informasi publik dan pelayanan yang prima serta dapat memberikan kontribusi terhadap PAD sektor kelautan dan perikanan," harap Sugianto.

Disebutkan, sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah provinsi Kalteng sebagai bentuk komitmen dan keberpihakan terhadap sektor kelautan dan perikanan antara lain membangun Pelabuhan Perikanan Kumai yang ditargetkan selesai tahun 2019 sehingga diharapkan menjadi pusat ekonomi nelayan, pembangunan Pelabuhan Perikanan di Kabupaten Pesisir Pantai mulai tahun 2020, pembangunan/rehabilitasi Unit Pengolah Ikan (UPI) bagi pelaku pengolahan ikan dan pemberian kolam bioflok kepada kelompok pemuda untuk menumbuhkan wirausaha baru perikanan.

Pada Peringatan HAFRKANAS tersebut Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyerahkan sertifikat ekspor kepada PT. Laut Pilar Perkasa dari Kumai Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan

mengekspor 11.480 kilogram udang papai atau udang kering ke China pada 21 November 2019.

Selain itu juga Launching Situs <http://geoportal-lautberkah.kalteng.go.id>, Lomba dan Demo Masak Serba Ikan, Lomba Menangkap Ikan serta Pembagian Kudapan Gratis Berbahan Dasar Ikan berupa 1.500 Bakso Ikan, 1.040 Stik Ikan dan 1.040 Otak-otak dalam kemasan mika.

Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM Widodo Sumiyanto mengatakan berdasarkan data FAO ternyata Indonesia telah mampu mengirimkan ikan ke 158 negara dari 190 negara di dunia. "Tahun 2018 sekitar 1 juta ton dan mudahan-mudahan tahun 2019 akan lebih dari itu, namun masyarakat Kalimantan Tengah tidak perlu khawatir karena yang kita ekspor tidak lebih dari 15 %, selebihnya kita konsumsi di dalam negeri," paparnya.

Menurut Widodo Sumiyanto, ikan dari Kalimantan Tengah telah terkirim ke luar daerah dengan rincian ikan hidup mencapai 1,5 juta ekor dan ikan yang langsung diekspor mencapai 500 ribu ekor, sedangkan ikan konsumsi yang dikirim ke luar Kalimantan Tengah mencapai 512 ton per tahun. "Apabila ini dikelola, diekspor langsung dari Kalimantan Tengah, maka masyarakat Kalimantan Tengah akan mendapatkan dampak yang luar biasa, baik dari ekonomi maupun perputaran tenaga kerja," jelasnya.

Widodo menambahkan, konsumsi ikan nasional saat ini adalah 50,06 dan Kalimantan Tengah dengan angka di atas 52, berada di atas rata-rata nasional. Namun konsumsi ikan tetap perlu ditingkatkan karena provinsi ini memiliki potensi. "Bagi kami yang lebih penting bukan hanya konsumsi, tapi konsumsi ikan yang segar dan aman. Selain itu tidak ada tambahan bahan berbahaya serta cara menangani dan sanitasinya benar. Itu yang menjadi konsentrasi kita, selain

meningkatkan konsumsi ikan itu sendiri," katanya.

Sementara itu Ketua TP PKK Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Koordinator Pokja 3 mengatakan Lomba Masak Serba Ikan merupakan implementasi salah satu dari 10 Program Pokok TP PKK yaitu Pangan.

Lomba Masak Serba Ikan ini sebagai bagian dari kegiatan

Pokja 3 yang dilaksanakan setiap tahun dan diikuti secara berjenjang oleh TP PKK Kabupaten/Kota dan Provinsi hingga Tingkat Nasional untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan. "Kandungan pada ikan merupakan modal dasar bagi kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan mencegah stunting," jelasnya.

Ivo berharap Lomba Masak Serba Ikan dapat mendorong

kreativitas dan merangsang minat ibu-ibu anggota TP PKK agar terus berkreasi menciptakan menu baru yang inovatif serta menggali potensi daerah yang sesuai dengan budaya masing-masing. "Informasi menu makanan berbahan baku ikan dapat disebarluaskan kepada masyarakat khususnya sebagai menu hidangan keluarga sehari-hari," imbuhnya.\*\*\*

## **Pemprov Kalteng Terima Penghargaan Kemenkeu RI Atas Opini WTP**

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas keberhasilan meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 5 kali berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2018.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Ratih Hapsari Kusumawardani kepada Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran disela-sela Rakordal Program-Program Pembangunan Provinsi Kalteng Triwulan III Tahun Anggaran 2019 di Palangka Raya, Rabu (16/10).

Penghargaan serupa juga diberikan kepada Kabupaten Barito Utara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur dan Sukamara yang meraih Opini WTP 5 tahun berturut-turut serta 13 Kabupaten dan Kota lainnya yang meraih Opini WTP tahun 2018, kecuali Kabupaten Seruyan yang masih belum mampu meraih Opini WTP dari BPK RI.

Gubernur Sugianto Sabran mengatakan Predikat WTP atas LKPD Provinsi serta 13 Kabupaten dan Kota tahun 2018 itu merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemprov, Kabupaten dan Kota sehingga diharapkan dapat

memacu peningkatan kinerja jajaran pemerintah daerah. "Dengan penghargaan ini, menunjukkan kerja keras kita selama ini membawa hasil sehingga dapat memotivasi kita agar mau bekerja lebih keras lagi", kata Gubernur.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalteng Ratih Hapsari Kusumawardani menjelaskan, terdapat 2 jenis penghargaan yang diberikan yaitu penghargaan kepada Pemda yang meraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda 2018 dan penghargaan kepada Pemda yang meraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda selama 5 tahun berturut-turut.

Sugianto Sabran ketika memimpin Rakordal Program Pembangunan Kalteng Triwulan III 2019 mengungkapkan indikator capaian pembangunan di Kalteng selama tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan. "Namun Saya tetap meminta Bupati dan Walikota agar intensif melaksanakan pembangunan terutama daerah pedalaman. Buka akses di wilayah yang masih terisolasi melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian secara merata", ujar Sugianto.

Indikator capaian kinerja 3 tahun RPJMD Provinsi Kalteng terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kalteng 2018 sebesar 5,64 %, lebih tinggi dari pertumbuhan

ekonomi nasional sebesar 5,17 %. Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2019 mencapai 6,03 % dan meningkat hingga 7,67 % pada triwulan kedua 2019.

Angka kemiskinan Maret 2019 tercatat 4,98 %, lebih rendah dari capaian nasional 9,41 %. Demikian juga IPM Kalteng 2018 sebesar 70,42, lebih rendah dari IPM nasional 71,39. Namun IPM Kalteng 2018 itu masuk dalam kategori kelompok tinggi, sedangkan gini ratio sampai Maret 2019 tercatat 0,336, lebih baik jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 0,382. "Saya berharap capaian indikator makro pembangunan tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi dengan sinergitas antara provinsi, kabupaten dan kota se-Kalteng dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berfokus pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian dalam arti luas", imbuh Sugianto.

Sugianto Sabran menegaskan, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah terbuka menerima investor yang memiliki visi yang sama dengan pemerintah daerah. Saat ini Kalimantan Tengah menjajaki kerjasama dengan investor Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas.\*\*\*

## Pimpinan DPRD Kalteng Periode 2019-2023 Ucapkan Sumpah.

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Empat orang Anggota DPRD Kalimantan Tengah masing-masing Wiyatno dari PDI Perjuangan, H.Abdul Razak dari Partai Golkar, Faridawaty Darlan Atjeh dari Partai NasDem dan H. Jimmy Carter dari Partai Demokrat terpilih sebagai Ketua dan Wakil Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Periode 2019-2024.

Pengucapan Sumpah Pimpinan DPRD Kalimantan Tengah Periode 2019-2024 tersebut dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya HM.Hatta pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Senin (07/10/2019).

Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kalimantan Tengah Periode 2019-2024 itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.62-5003 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno mengatakan proses penetapan Pimpinan DPRD Kalteng Periode 2019-2024 telah melalui mekanisme yang panjang dan demokratis. "Hal ini tentu dilandasi oleh kebersamaan yang tinggi serta komitmen bersama menyangkut tenaga dan pikiran untuk diabdikan kepada

pembangunan Kalimantan Tengah yang kita cintai," jelas Wiyatno.

Dikemukakan, setelah pengucapan Sumpah Pimpinan Dewan, maka agenda selanjutnya adalah pembentukan alat kelengkapan Dewan yang meliputi Komisi-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Kehormatan Dewan.

Menurut Wiyatno ada beberapa agenda prioritas yang harus diselesaikan pada Masa Persidangan tahun 2019 antara lain Pembahasan KUA/PPAS dan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 yang merupakan Program Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka upaya menyejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah yang memerlukan dukungan semua pihak termasuk Pemerintah Provinsi Kalteng sebagai mitra kerja Dewan.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran pada Rapat Paripurna Dewan tersebut mengatakan pelantikan Pimpinan DPRD Kalteng Periode 2019-2024 itu sebagai momentum untuk mengawali pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sugianto Sabran

mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Kalimantan Tengah mempunyai tugas yang cukup berat dan harus segera diselesaikan dalam waktu dekat. "Kita bersama dan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang dilantik hari ini masih mempunyai tugas yang cukup berat dan harus segera kita selesaikan bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama," kata Gubernur.

Tugas-tugas tersebut antara lain menyelesaikan pembahasan Raperda Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah serta pencabutan Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Tengah dan menyelesaikan penyusunan RAPBD Tahun 2020. "Kontrol dari DPRD juga sangat diharapkan agar pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan tetap berjalan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," imbuhnya.

Rapat Peripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kalteng Periode 2019-2024 itu juga dihadiri Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya, sejumlah Anggota DPRD Periode sebelumnya, Anggota Forkopimda, Ketua KPU dan Bawaslu Kalteng serta Pimpinan Partai Politik yang berhasil meraih kursi DPRD Kalteng.\*\*\*

## Gubernur Kalteng : P3MD Sebagai Instrumen Keberhasilan Pembangunan

Palangka Raya – Biro PKP. Berbagai upaya dilakukan untuk menyukseskan pembangunan desa antara lain melalui Jambore Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dinilai memiliki makna strategis karena mencakup keberadaan Para Pendamping Desa. Tenaga Pendamping Desa merupakan salah satu instrumen penting dan garda terdepan dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan di Desa.

Para Pendamping Desa di

Kalimantan Tengah tersebar di 1.433 desa pada 131 Kecamatan dalam 13 Kabupaten adalah modal dan kekuatan besar untuk melaksanakan pembangunan Kalimantan Tengah.

Aktivitas Para Pendamping Desa yang siap dan harus berbaur dalam mendampingi masyarakat dan aparatur desa menjadi sangat strategis dalam mempercepat akselerasi pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Tengah. "Saya atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan

apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh Tenaga Pendamping Profesional yang selama ini telah bekerja keras, tulus dan tanpa pamrih serta berpartisipasi aktif dalam mendampingi masyarakat dan aparatur desa. Hal itu sebagai upaya bersama untuk mensukseskan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah yang kita cintai bersama", kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Plt. Asisten Administrasi

Umum Sekda Kalteng Kaspinor di hadapan peserta Jambore Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Selasa (26/11/2019).

Gubernur mengajak seluruh Tenaga Pendamping Profesional di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah agar terus berkarya semaksimal mungkin dalam mendukung dan mengisi pelaksanaan pembangunan sehingga program P3MD dapat terus dipacu seirama dengan dinamika pembangunan serta dapat diselaraskan dengan perkembangan kebijakan pemerintah daerah yang sedang dan akan dilaksanakan. "Saya berharap agar pendampingan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi pioner utama dan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan serta dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kalimantan Tengah", terang

Sugianto Sabran.

Disebutkan, tahun 2019 merupakan tahun ke - 5 penyaluran Dana Desa sebagai bentuk perwujudan amanat Undang Undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa. Selama lima tahun Dana Desa dikucurkan secara bertahap telah membawa dampak positif dan terjadi beberapa perubahan mendasar di desa. Perbaikan tata kelola pemerintahan serta keuangan dan pembangunan di berbagai sektor termasuk pemberdayaan masyarakat desa perlahan namun pasti mulai dirasakan terjadi perubahan oleh masyarakat desa.

Namun persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial dan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat pedesaan menjadi persoalan sekaligus tantangan bagi pelaku, pendamping, pengawas dan pembina program di daerah tugas masing-masing.

"P3MD sangat sejalan dengan Visi Misi saya sebagai Gubernur dan Habib Ismail sebagai Wakil Gubernur, khususnya pada misi ke 4 yaitu pertumbuhan ekonomi

dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan instrumen yang sangat penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu menciptakan kehidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi masyarakat pedesaan melalui pembangunan dan pemberdayaan, merupakan program prioritas dan komitmen pemerintah daerah saat ini", tegas Gubernur.

Kesamaan dalam menjalankan visi dan misi tersebut membuat seluruh capaian pembangunan di Kalimantan Tengah terutama yang terkait dengan Dana Desa dapat dibilang berhasil, karena dukungan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mempercepat seluruh proses tahapan Dana Desa sampai pada tahap pelaksanaan di desa masing-masing. Hal ini sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju KALTENG BERKAH. \*\*\*

## **Sekda : Kepala OPD Harus Aktif Lakukan Monitoring dan Evaluasi**

Palangka Raya – Biro PKP. Sekda Kalteng Fahrizal Fitri mengingatkan seluruh Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah agar lebih proaktif melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pemberian/penyaluran dana hibah serta bantuan sosial supaya tepat sasaran secara administrasi dan pelaporan sehingga tidak disalahgunakan.

"Karena pemberian dana hibah dan bantuan sosial menjadi perhatian masyarakat secara umum serta diawasi ketat oleh aparat penegak hukum", tegas Sekda dalam sambutannya disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriyatun di hadapan peserta Rapat Koordinasi Teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 di Palangka Raya, Rabu (16/10).

Fahrizal Fitri mengatakan pemberian hibah dan bantuan sosial diduga rawan penyalahgunaan penggunaan anggaran. Karena itu ia meminta kepada masing-masing pengelola dana hibah dan bantuan sosial agar selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. "Saya meminta Kepala Daerah Kabupaten dan Kota se-Kalteng agar terus memonitoring dan mengevaluasi proses perencanaan dan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial sehingga tepat sasaran, tepat administrasi dan tepat pelaporan," ujarnya.

Kepala Daerah juga harus menyampaikan hasil pelaksanaan monitong dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut kepada Gubernur secara periodik.

Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pemberian hibah serta bantuan sosial antara Pemprov Kalteng dengan Pemda Kabupaten dan Kota juga harus ditingkatkan.

Demikian juga penerima hibah dan bantuan sosial yang berbentuk uang harus menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait. Bagi penerima hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa juga harus menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah terkait. "Perlu diketahui bahwa pemberian hibah ini tidak secara terus menerus dan tujuannya untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah," pungkasnya.\*\*\*

## Sugianto Sabran : ASN Harus Mengikuti Era Digitalisasi 4.0

Palangka Raya – Biro PKP. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah beserta seluruh BPSDM Provinsi dan BKD/BKPP/BKPSDM Kabupaten/Kota se-Kalimantan bekerjasama dengan LAN RI menggelar Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) di Palangka Raya.

Jambore Inovasi Kalimantan merupakan event yang dirancang untuk menghadirkan berbagai inovasi pelayanan publik sebagai bukti kehadiran pemerintah untuk masyarakat. Jambore Inovasi Kalimantan juga ingin menunjukkan semua unsur Aparatur Sipil Negara di Kalimantan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyajian Inovasi Administrasi Negara dan pelayanan publik yang terbaik.

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah Sri Widanarni mengatakan salah satu rangkaian Jambore Inovasi Kalimantan 2019 adalah Forum Pelatihan, Pengembangan dan Kewidyaishwaraan yang

dilanjutkan dengan Forum FKBK se-Kalimantan.

Sri Widanarni menjelaskan Forum Latbang dan Kewidyaishwaraan ini bertujuan membentuk persamaan pandangan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan kapasitas Widyaishwara sebagai pengajar bagi Program Penjenjangan Struktural Kediklatan. "Isu Strategis yang disajikan meliputi Kebijakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas serta tantangan Revolusi Industri 4.0", jelas Sri Widanarni.

"Revolusi Industri 4.0 merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus terealisasi dengan cara pengembangan kompetensi manusia melalui digitalisasi moder", ungkap Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Yuel Tanggara dalam Forum Pelatihan, Pengembangan dan Kewidyaishwaraan dalam rangka Jambore Inovasi Kalimantan

Tahun 2019 di Palangka Raya, Selasa (22/10/2019).

Menurut Sugianto Sabran, banyak contoh pelayanan yang dapat disajikan melalui aplikasi dewasa ini dan itu semua merupakan tuntutan kemajuan era digitalisasi dalam Revolusi Industri 4.0. "Kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintahan, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga berdampak terhadap pertumbuhan Ekonomi masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing dan diharapkan juga mampu mengikuti perkembangan Zaman era digitalisasi 4.0 tersebut", kata Gubernur.

Gubernur berharap forum tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana konsultasi, berbagi pengalaman, sharing pengetahuan dan membahas poin-poin penting tentang tantangan ke depan dalam upaya pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan maupun skala nasional.\*\*\*

## Sugianto Sabran : Kelola Pemerintahan Perlu ASN Berkarakter.

Palangka Raya – Biro PKP. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah kembali menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri untuk Jabatan Administrator dan Pengawas lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019. Diklat Pimpemdagri ini merupakan Diklat Perdana sekaligus sebagai pilot project BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah setelah keluarnya Permendagri No. 85 Tahun 2017.

Diklat ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan karakteristik ASN yang diperlukan untuk melaksanakan pengelolaan pemerintahan, meningkatkan semangat pengabdian, patriotisme, etos kerja ASN dalam penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan nilai-nilai ASN, Kepamongprajaan dan etika pemerintahan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Namun masih ada salah satu permasalahan dalam

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam pelayanan publik yaitu belum optimalnya kinerja aparatur. "Oleh karena itu, profesionalisme aparatur merupakan tuntutan dalam mewujudkan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien", kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Kalteng Kalteng Fahrizal Fitri ketika membuka Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 di Palangka Raya, Kamis (10/10/2019).

Penyelenggaraan Diklat Pimpemdagri itu mengacu pada Standar Kompetensi Pemerintahan yang diatur dalam Permendagri No. 108 tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Diklat ini diharapkan dapat membekali peserta sehingga memiliki kemampuan terstandar untuk

melaksanakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan urusan pemerintahan secara keseluruhan yang dibuktikan dengan hasil sertifikasi kompetensi.

Sertifikasi dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Dalam Negeri melalui uji kompetensi yang merujuk kepada standar kompetensi kerja sebagai rumusan kecakapan kerja. "Rumusan kecakapan kerja tersebut mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas urusan Pemerintahan Dalam Negeri yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab serta menghasilkan kinerja kontributif dalam pencapaian tujuan organisasi", tegas Sugianto.

Diklat Pimpemdagri Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 ini diikuti 30 orang peserta Eselon IV dan 30 peserta Pelaksana dan Fungsional di Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.\*\*\*

## **Sekda Kalteng Minta Pemda Kawal Alokasi Pupuk Bersubsidi**

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Pemerintah Daerah harus mengawal alokasi pupuk bersubsidi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran. Hal tersebut menjadi pokok bahasan dalam Pertemuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (21/10/2019).

“sarana produksi pupuk hendaknya dekat dan terjangkau oleh petani. Karena itu perlu dicari jalan keluar agar sarana tersebut dekat dengan daerah-daerah sentra produksi,” jelas Sekda Kalteng dalam sambutan tertulis yang disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Yuas Elko dalam Pertemuan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang membahas upaya-upaya mengawal alokasi pupuk bersubsidi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran.

Dijelaskan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam penyediaan pupuk dan

pestisida antara lain melalui subsidi sehingga harga pupuk relatif murah dan terjangkau oleh petani. Alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 03/PPS-691/01/2019 adalah Urea 17.154 ton, SP-36 4.639 ton, ZA 1.356 ton; NPK 31.757 ton dan Organik 2.862 ton. “Alokasi pupuk bersubsidi tersebut handaknya dapat dikawal serta dioptimalkan pemanfaatannya oleh Pemerintah Daerah, sehingga tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Fahrizal Fitri.

Terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya antara lain Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tidak valid dan tidak tepat waktu, penerbitan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati yang tidak tepat waktu, serta ketidakpuasan distributor dan kios dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dari segi administrasi maupun berdasarkan ketentuan yang berlaku. “Memperhatikan

hal tersebut, maka pengawasan peredaran, penggunaan pupuk dan pestisida harus dilaksanakan secara terkoordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota,” harap Fahrizal.

Fahrizal juga berharap pertemuan ini dapat mengoptimalkan kinerja KP3 sehingga pupuk dan pestisida lebih terjamin ketersediaan dan kualitasnya, tidak merugikan pengguna dan kelestarian lingkungan, serta mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional. “Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan suatu rumusan kesepakatan antara instansi terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam penanganan pupuk bersubsidi,” imbuhnya.

Pertemuan tersebut dihadiri Pimpinan Dinas/Instansi terkait tingkat provinsi, anggota KP3 Provinsi dan Perwakilan KP3 Kabupaten/Kota serta perwakilan dari Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementerian Petanian RI, perwakilan Distributor dan Polda Kalimantan Tengah.\*\*\*

## **Sugianto : Dewan Harus Miliki Kemampuan Menyusun Regulasi Strategis**

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengharapkan kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD se-Kalimantan Tengah agar terus meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bersama pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan tertulis dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri ketika menutup Orientasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah tahun 2019 di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Sabtu (5/10/2019).

Pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang diperoleh

para pimpinan dan anggota DPRD melalui Orientasi tersebut diharapkan dapat diterapkan dan dikembangkan dalam pelaksanaan tugas di daerah masing-masing. “Ilmu yang diperoleh tidak akan ada artinya apabila tidak diaplikasikan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas Bapak dan Ibu”, tegas Gubernur.

Dikemukakan, sumber daya alam yang dimiliki Kalteng perlu dikelola dengan lebih baik, efektif dan efisien agar tidak tertinggal dari laju pembangunan global dewasa ini.

Oleh karena itu Pimpinan dan Anggota DPRD memerlukan kemampuan yang memadai untuk menuangkan visi ke dalam kebijakan pembangunan Provinsi

Kalteng serta kemampuan yang memadai juga untuk menyusun regulasi dalam rangka mengimplementasikan kebijakan strategis tersebut. “Bekal pengetahuan yang diperoleh selama Orientasi itu diharapkan dapat menambah wawasan untuk mengatasi permasalahan di tengah masyarakat dan bermanfaat bagi anggota DPRD dalam mengambil dan memutuskan kebijakan strategis dalam rangka pembentukan produk legislasi serta memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati/Walikota sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik guna mewujudkan KALTENG BERKAH”, jelas Sugianto Sabran.\*\*\*

## Pemprov Kalteng dan Elite Agro Uni Emirat Arab Tandatangani Letter of Intent

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Elite Agro Uni Emirat Arab akan merealisasikan kerjasama investasi di sektor pertanian dan perkebunan di Kalimantan Tengah.

Kerjasama inventasi di sektor pertanian dan perkebunan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Letter of Intent oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dan Abdulmonem Almarzooqi selaku CEO of Elite Agro United Arab Emirates LLC di Palangka Raya, Kamis (17/10/2919).

Letter of Intent itu berisitentang Kerjasama Pengembangan Pertanian dan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dikelola oleh Elite Agro Uni Emirat Arab yang merupakan salah satu perusahaan pertanian hortikultura terkemuka di Uni Emirat Arab.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran

menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah pusat yang mempercayakan Kalimantan Tengah melakukan kerjasama di bidang hortikultura dengan Uni Emirat Arab. "Nantinya tim teknis akan menyiapkan hal-hal yang diperlukan, seperti lokasinya di mana, luasnya berapa, sistem kerjasamanya bagaimana", jelas Sugianto Sabran.

Semula, permintaan lahan seluas 100.000 hektar, namun untuk tahap awal akan disiapkan lahan seluas 5000 hektar di wilayah tengah Provinsi Kalimantan Tengah untuk pengembangan buah-buahan dan sayuran. "Dengan adanya Elite Agro ini masuk ke Kalimantan Tengah, Saya harapkan semua OPD yang terkait dapat bekerja bersama dengan tim untuk mensukseskan proyek kerjasama antara Uni Emirat Arab dan Indonesia di provinsi Kalimantan Tengah, sehingga mendatangkan berkah

bagi Kalimantan Tengah dan masyarakatnya", ujar Sugianto Sabran.

CEO Elite Agro Uni Emirat Arab LLC Dr. Abdulmonem Almarzooqi mengungkapkan pihaknya akan segera memulai proyek di Kalimantan Tengah sesuai yang telah dijanjikan sebelumnya. "Kami melihat bahwa potensi di wilayah ini sangat tinggi. Jadi, semua tim kami bekerja keras untuk mempersiapkan data yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek ini nantinya. Tim ini meliputi tim teknis dan pemasaran, dan juga tim yang menyusun masterplan serta mempersiapkan legalitas hukumnya sehingga proyek ini bisa segera dimulai", ungkap Abdulmonem Almarzooqi.

Abdulmonem Almarzooqi juga menegaskan pihaknya siap memulai kerjasama proyek tersebut. "Kami juga berkeinginan untuk melihat dan mempelajari lahan percontohan yang menggunakan teknologi pertanian yang telah diterapkan di wilayah Kalteng", ujarnya.

Perusahaan Elite Agro Uni Emirat Arab LLC memiliki program yang sangat mumpuni dalam hal Corporate Social Responsibility (CSR) meliputi banyak program yang melibatkan masyarakat sekaligus juga pengembangan komunitas masyarakat, isu-isu lingkungan, masalah ketenagakerjaan, dan hal-hal yang terkait pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan. "Saya berterimakasih kepada Gubernur Kalteng dan juga tim, atas kerja kerasnya untuk mewujudkan kerjasama ini bersama kami. Saya juga ingin mengundang Bapak Gubernur berkenan suatu saat berkunjung ke Uni Emirat Arab untuk melihat bagaimana lahan pertanian yang kami miliki di sana", kata Abdulmonem Almarzooqi.

Penandatangan Letter of Intent itu juga dihadiri Yosi Staf Kedutaan Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab dan Razak selaku Perwakilan Kementerian Luar Negeri RI serta sejumlah Kepala OPD terkait.\*\*\*



## Pemprov dan DPRD Kalteng Tandatangani 2 Nota Kesepahaman.

Palangka Raya – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pimpinan DPRD Kalimantan Tengah menandatangani 2 buah Nota Kesepahaman masing-masing tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Paripurna Ke - 5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Rabu (20/11/2019).

Kedua dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah hasil pembahasan bersama sebagai wujud nyata kemitraan yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Perda Nomor : 1 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017. Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, sedangkan tema pembangunan tahun 2020 sesuai RPJMD adalah “Pemantapan Struktur Ekonomi Melalui Optimalisasi Investasi dan Peningkatan Nilai Tambah

Ekonomi Produk Unggulan Daerah”.

“Secara umum target/sasaran indikator makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 diantaranya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,65, laju inflasi 2,8 hingga 3,2 persen, angka kemiskinan 4,75 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,7 persen, Gini Rasio 0,327 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,52”, ungkap Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri di hadapan peserta Rapat Paripurna Ke 5 Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 tersebut.

Dari sisi Keuangan Daerah disebutkan asumsi dasar kebijakan umum tahun 2020 meliputi pendapatan daerah pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan dibandingkan target pendapatan pada APBD Perubahan Tahun 2019 yakni dari 4,926 triliun rupiah lebih menjadi 5,121 triliun rupiah lebih atau mengalami kenaikan sebesar 3,95 persen. Demikian juga pada aspek pembiayaan daerah disebutkan untuk pembiayaan

netto pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 sebesar 267,51 miliar rupiah lebih, sedangkan dari sisi belanja daerah pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 sebesar 5,38 triliun rupiah lebih.

Berkenaan dengan perubahan asumsi dasar KUA tersebut maka struktur anggaran dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2020 disusun dengan target dan plafon yang disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah yakni pada posisi pendapatan sebesar 5,121 triliun rupiah lebih dan belanja sebesar 5,38 triliun rupiah lebih yang terdiri Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 2,93 triliun rupiah lebih dan Belanja Langsung (BL) sebesar 2,45 triliun rupiah lebih atau mengalami defisit sebesar 267,51 miliar rupiah lebih dan pembiayaan netto sebesar 267,51 miliar rupiah lebih.

“Demikian beberapa kebijakan, prioritas dan plafon anggaran sementara yang akan kita laksanakan pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020, semoga apa yang kita rencanakan dan kerjakan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah demi terwujudnya Kalteng Berkah”, terang Gubernur Sugianto Sabran.\*\*\*

## Komisi IV DPR : Relawan Pemadam Api Harus Jadi Relawan Pencegah Api

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Komisi IV DPR RI merekomendasikan relawan pemadam api nantinya akan diorientasikan menjadi relawan mencegah api. “Ke depan kita orientasikan bukan relawan pemadam api, tapi relawan pencegah api untuk berkobar,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Rabu (6/11/2019).

Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya menyarankan ke depannya para relawan peduli api dilengkapi dengan asuransi. “Saya menyarankan relawan dilengkapi asuransi kesehatan, asuransi jaminan kecelakaan kerja dan asuransi kematian. Nanti dicatat, tiga-tiganya dimasukkan dalam satu asuransi. Kita pasti usulkan itu,” ucapnya.

Dedi Mulyadi menjelaskan upaya penanggulangan Karhutla ke depan akan lebih berorientasi pada pencegahan dibanding

pemadaman api. “Nanti kita sepakati membuat regulasi. Desa yang berhasil mencegah kebakaran hutan mendapat bonus. Kemudian, bukan relawan pemadaman yang diperbanyak, tapi relawan pencegahan sehingga di setiap daerah yang punya potensi melakukan pembukaan lahan harus didampingi relawan pencegahan kebakaran”, tegasnya.

Dedi Mulyadi menambahkan, alokasi anggaran desa untuk desa yang berpotensi mengalami kebakaran hutan harus ditambah guna melakukan restorasi pengelolaan hutan. Bahkan tidak menutup kemungkinan para relawan peduli api diangkat menjadi PNS atau tenaga kontrak. “Istilahnya bisa tenaga kontrak yang digaji setiap bulan dalam waktu tertentu. Biaya recovery dari kebakaran hutan jauh lebih mahal dibanding memberi gaji untuk pencegahan,” imbuhnya.

Selain masalah penanggulangan dan pencegahan

Karhutla menurut Dedi Mulyadi yang perlu mendapat perhatian adalah izin pembukaan lahan juga diperlukan. “Harus ada regulasi soal izin membuka lahan. Selama ini hanya berlaku izin lokasi dan izin pengelolaan lahan. Nanti harus ada izin pembukaan lahan,” paparnya sembari menegaskan orang yang melakukan pembakaran atas nama korporasi tidak boleh memakai “baju baru” lagi untuk kepentingan pengelolaan kawasan hutan.

Dua orang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dan Daniel Johan beserta 12 orang anggota dan 5 orang staf Komisi IV DPR RI setelah kunjungan kerja spesifik ke Desa Tanjung Taruna Kabupaten Pulang Pisau tersebut, menyambangi Tugu Soekarno di Palangka Raya dan dilanjutkan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kalteng di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng.\*\*\*

## **September, Kalteng Inflasi (- 0,07 %)**

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Provinsi Kalimantan Tengah pada September 2019 mengalami deflasi minus 0,07% (mtm), namun lebih rendah dibanding Agustus minus 0,29% (mtm). Kelompok penyumbang deflasi Kalteng September masing-masing kelompok Volatile Foods minus 1,03 % (mtm) dan Administered Price minus 0,05 % (mtm).

TPID Kalteng dalam Siaran Persnya mengemukakan, periode mendatang diperkirakan beberapa hal yang dapat memengaruhi tekanan inflasi antara lain pada kelompok Volatile Foods sebagai dampak bencana kabut asap dan potensi kenaikan harga daging ayam ras, sedangkan pada kelompok Administered Prices akibat kenaikan harga rokok kretek dan harga minyak dunia, serta kelompok Core bisa terjadi akibat kenaikan harga emas dunia.

Kondisi terkini terjadi fluktuasi harga beberapa komoditas seperti daging ayam ras (broiler) selama september turun dan kini mulai

merangkak naik, namun pasokan cukup lancar dari Kalsel meskipun terjadi kabut asap, tapi permintaan masyarakat menurun. Oktober ini masuk 24.000 ekor bibit ayam ras DOC ke kandang penyangga yang siap panen November untuk mengantisipasi permintaan Natal dan Tahun Baru.

Demikian juga di sektor BBM sempat terjadi kelangkaan akibat penyaluran yang tidak semestinya oleh pihak pangkalan dan stok elpiji juga menipis, namun Dinas ESDM sudah mengajukan permohonan tambahan stok elpiji untuk mengantisipasi naiknya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru.

Dampak kemarau panjang juga berimbas pada sulitnya pembibitan ikan nila dan patin, sedangkan stok ikan tangkap seperti gabus sangat minim di pasaran karena penangkapannya terlalu dieksplorasi. Memasuki musim penghujan, kolam penyangga dan peternak mulai melakukan pembibitan kembali.

Saat ini kolam penyangga memiliki stok 1000 ikan nila dan 1000 ikan patin dalam masa penggemukan.

Demikian juga ketersediaan stok beras CPP/PSO di gudang Bulog tercatat 7000 ton cukup untuk kebutuhan 7-8 bulan ke depan. Stok gula juga aman karena tersedia 38 ton, stok beras komersil premium 467 ton, telur ayam 451 kg, bawang putih 300 kg, bawang merah 280 kg, minyak goreng 61.000 liter dan daging kerbau beku 21.000 ton.

TPID Provinsi Kalimantan Tengah ke depan terus melakukan pemantauan harga pasar dan mengendalikan ekspektasi masyarakat melalui Siaran Pers, menjaga ketersediaan stok dan kelancaran distribusi komoditas yang didatangkan dari luar daerah. Selain itu melakukan peningkatan kualitas pemanfaatan kandang penyangga, kolam penyangga dan pasar penyeimbang untuk menjaga kestabilan harga serta program supply chain daging ayam segar beku.\*\*\*

## **Jelang Natal dan Tahun Baru, Bupati dan Walikota Diminta Hidupkan Pasar Penyeimbang**

PALANGKA RAYA – Menjelang Natal dan Tahun Baru sebulan ke depan, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meminta Bupati dan Walikota se-Kalimantan Tengah menghidupkan peran Pasar Penyeimbang. "Saya menitipkan pesan agar Bupati/Walikota masing-masing dapat mengaktifkan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah—TPID melalui pemanfaatan Pasar Penyeimbang di daerah masing-masing," demikian disampaikan Gubernur kepada para kepala dinas yang membidangi perdagangan dalam Rapat Koordinasi Stabilitas Harga dan Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (28/11/2019).

Menyikapi kekhawatiran akan menipisnya ketersediaan stok dan naiknya harga barang kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, Gubernur

dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri juga meminta dinas/instansi terkait terkait untuk mengantisipasi kelangkaan pasokan yang dapat berdampak pada kenaikan harga. "Ini perlu kita sikapi karena kenaikan harga barang kebutuhan pokok sangat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu," tuturnya.

Kepala dinas/instansi terkait, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diminta selalu berkoordinasi dalam memastikan keamanan dan kelancaran arus distribusi barang. "Setiap datangnya hari besar keagamaan, kepadatan arus lalu lintas jalan tidak dapat dihindari. Hal ini dapat menimbulkan terlambatnya pasokan sampai ke daerah tujuan dan menipisnya persedian/stok pada tingkat agen, distributor, dan pedagang besar," jelas Gubernur.

Berkaitan dengan

pelaksanaan pasar murah menjelang hari-hari besar keagamaan, dinas/instansi terkait diminta bekerjasama dengan pihak lain seperti distributor/pengecer. Sementara itu, Tim Satgas Pangan diminta lebih intensif turun Sidak ke pasar-pasar dan memantau harga, sehingga ekspektasi masyarakat tentang ketersediaan barang kebutuhan pokok dapat dinetralisir. "Para pelaku usaha juga jangan memanfaatkan moment ini untuk mempermainkan harga barang kebutuhan pokok, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang wajar," imbuhan Gubernur Sugianto Sabran.

Rapat koordinasi kali ini, antara lain dihadiri Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional Arlinda, para kepala dinas/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, para kepala dinas yang membidangi perdagangan dari Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, serta para pelaku usaha.\*\*\*

## Pemprov dan BPKP Kalteng Luncurkan Sistem Supervisi Rumah Sakit

PALANGKA RAYA – BIRO PKP. Pembangunan Sumber Daya Manusia dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan serta kesehatan bayi dan balita hingga jaminan kesehatan anak-anak sekolah yang merupakan usia emas untuk mencetak manusia yang unggul de depan. “Hal ini yang harus diperhatikan betul-betul. Jangan sampai ada stunting serta kematian bayi dan ibu hamil. Ini yang menjadi tugas kita bersama untuk menanggulanginya”, tegas Gubernur Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Endang Kusriyatun pada Launching Sistem Supervisi Internal Rumah Sakit di Palangka Raya, Senin (14/10/2019).

Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah negara atau wilayah digolongkan maju, berkembang dan terbelakang termasuk untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup adalah Indeks Pembangunan Manusia. IPM memiliki tiga dimensi dasar yaitu dimensi kesehatan terkait dengan umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran serta dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah) dan dimensi standar hidup layak (jumlah pendapatan).

Guna terwujudnya peningkatan mutu dan jangkauan layanan kesehatan sebagai salah satu unsur penentu keberhasilan IPM diperlukan pengelolaan Rumah Sakit yang efektif, efisien dan akuntabel. “Untuk mewujudkan hal tersebut maka peran Satuan Pengawas Intern (SPI) selaku unsur pengawasan internal yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin Rumah Sakit, dapat melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat”, tegas Sugianto Sabran.

Dijelaskan,

Satuan

Pengawas Intern pada dasarnya bertugas membantu Manajemen/ Pemimpin Rumah Sakit untuk pengamanan harta kekayaan/ aset, menciptakan akurasi sistem informasi keuangan, menciptakan efisiensi dan produktifitas serta mendorong dipatuhiannya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat. “Kami sangat berterima kasih kepada BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah yang bersedia membantu mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi”, kata Gubernur.

Sementara itu Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Tengah Setia Pria Husada mengatakan Sistem Supervisi Internal Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan salah satu bentuk inovasi BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah. Ide besar penerapan BLUD adalah meningkatkan kualitas layanan RS Pemerintah melalui pendekatan praktek bisnis yang sehat dan tetap mengutamakan misi sosial Rumah Sakit.

Berkenaan hal tersebut maka Rumah Sakit diberikan berbagai fleksibilitas antara lain dapat mengelola pendapatan operasional tanpa disetor ke Kas Daerah terlebih dahulu dan mengatur pengadaan barang dan jasa secara tersendiri serta dapat melakukan transaksi utang piutang dan investasi dalam rangka mengembangkan asset dan lain-lain.

Namun berbagai resiko dapat muncul seiring dengan fleksibilitas tersebut mengingat jumlah dana yang sangat besar dikelola RS sangat rawan akan penyimpangan. “Untuk meminimalisir berbagai penyimpangan tersebut dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI) di RS Pemerintah yang telah melakukan BLUD berdasarkan Permendangri Nomor : 79 tahun 2018 tentang BLUD. “SPI harus melakukan pengawasan terus

menerus terhadap kinerja dan layanan. Orientasinya obyek pengawasan saat ini dan masa depan yang berfokus pada pencegahan, bukan penindakan” tegas Setia Pria Husada.

Dalam prakteknya secara nasional selama ini, SPI hanya melakukan fungsi pengawasan pada saat diminta oleh Direksi. “Praktek seperti ini menjadikan SPI hanya sebagai pemadam kebakaran dalam melakukan pengawasan setelah terjadi masalah. Dalam konsep pengawasan modern, peran SPI seharusnya lebih ke taraf pencegahan,” imbuh Setia Pria Husada.

.Hasil inovasi BPKP Perwakilan Kalteng ini nantinya akan diterapkan ke seluruh RSUD di Kalimantan Tengah sebelum diterapkan secara nasional.

Tahap pertama, RSUD dr. Murjani Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi lokasi pilot project atau proyek percontohan inovasi tersebut. Hal ini berawal ketika BPKP Perwakilan Kalteng Tengah berencana mengembangkan inovasi ini bertepatan dengan jajaran Direksi RSUD dr. Murjani tengah meminta asistensi penguatan SPI di RSUD Murjani Sampit. “Jadi Gayung bersambut. Direksi merasakan peran SPI di RSUD dr. Murjani belum optimal. Salah satu faktor utama adalah belum adanya pedoman yang memberikan acuan SPI untuk dapat melaksanakan tupoksinya terkait pengawasan internal dalam hal pengelolaan BLUD RS sehingga pekerjaan SPI hanya sebagai pemadam kebakaran dan melakukan audit saat masalah sudah terjadi”, beber Kepala BPKP Perwakilan Kalteng tersebut.

Launcing Sistem Supervisi RSUD ini dihadiri Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah Sapto Nugroho, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Direktur RSUD dan Ketua SPI RSUD se-Kalimantan Tengah serta Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Wilayah Kalteng.\*\*\*

## **Gubernur Kalimantan Tengah Selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka pada Upacara Pembukaan Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Berkah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019**

Gerakan Pramuka sebagaimana juga gerakan kepanduan di seluruh dunia merupakan kegiatan pendidikan di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga untuk kaum muda yang bersifat sukarela, tidak berpolitik, terbuka untuk semua dan tanpa membedakan asal-usul, ras, suku dan agama. Penyelenggaraan aktivitasnya dilakukan melalui sistem nilai yang universal yaitu kepanduan.

Sistem pendidikan Pramuka sebagai sistem pendidikan non formal membantu dan melengkapi pendidikan formal dalam upaya pembentukan watak dan kepribadian kaum muda sebagai kader bangsa yang cinta tanah air, dan berkarakter. Untuk itu Gerakan Pramuka menyelenggarakan kegiatan yang menarik, bersifat rekreatif dan edukatif di alam terbuka.

"Saya menyambut gembira penyelenggaran kegiatan Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah ini, karena melalui kegiatan ini mencoba mengenal, menghayati sebagian aktivitas kegiatan kepramukaan dalam menyelenggarakan tugasnya yaitu berkemah hal itu berarti hidup di alam terbuka dengan segala tantangannya, dalam keadaan yang sederhana dan fasilitas yang terbatas, segala sesuatu harus dikerjakan secara mandiri atau berkelompok tetapi terus berlatih, berkarya, memelihara lingkungan hidup serta senantiasa dalam suasana gembira dan persaudaraan dan melalui pengenalan dan penghayatan terhadap kegiatan Pramuka saya berharap kita tiba pada kesadaran bahwa tugas kita dalam berbagai tugas dan peran, baik sebagai pejabat di eksekutif, legislatif dan yudikatif harus memberikan peran serta yang nyata dalam upaya membina dan mengembangkan kegiatan kepramukaan di Kalimantan Tengah", ungkap Gubernur

Kalimantan Tengah Sugianto Sabran Selaku Ketua Mabida Gerakan Pramuka pada Upacara Pembukaan Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Berkah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 yang diadakan di Komplek Perkemahan Pantai Ujung Pandaran Kabupaten Kotawaringin Timur, Sabtu (30/11/19).

Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah dalam upaya menjalin kerjasama dan saling memahami peran serta para pejabat di Jajaran Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Untuk itu dipadukan suatu kegiatan bersama yang memberikan wawasan dan suasana kepramukaan dalam bentuk kegiatan khas Gerakan Pramuka yaitu perkemahan. Di dalam kegiatan perkemahan tersebut diharapkan terbinanya kemitraan, kebersamaan dan keakraban antar sesama peserta perkemahan. Pada gilirannya kemitraan dan kebersamaan tersebut diharapkan berdampak positif bagi tugas fungsi masing-masing dan juga perkembangan Gerakan Pramuka di Kalimantan Tengah. Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif ini merupakan momen yang penting dalam rangka menumbuhkembangkan Gerakan Pramuka di Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan kemah ini diharapkan adanya komitmen bersama semua komponen untuk mendukung penyediaan fasilitas bagi pembinaan Pramuka di Kwartir Daerah Kalimantan Tengah dan Kwartir-Kwartir Cabang di seluruh Kalimantan Tengah.

"Melalui perkemahan ini, saya harapkan ada momentum kesepakatan kita selaku Ketua Majelis Pembimbing (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk membumikan Gerakan Pramuka di seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, mengalokasikan anggaran Pembinaan dan kegiatan kepramukaan secara signifikan melalui APBD masing-masing untuk Kwartir Daerah dan Kwartir

Cabang, serta penyediaan sarana dan prasarana Bumi Perkemahan, Pusdiklat dan Kantor Sekretariat Kwartir Cabang se Kalimantan Tengah, menetapkan penggunaan pakaian seragam pramuka lengkap setiap tanggal 14 pada hari kerja bagi seluruh ASN se Kalimantan Tengah, dan mendukung terselenggaranya kegiatan Kepramukaan Tingkat Nasional di Kalimantan Tengah", terang Gubernur.

Kegiatan Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Berkah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai dengan 1 Desember 2019 dengan peserta Utusan Provinsi, Kabupaten dan Kota, SOPD Provinsi, Jajaran eksekutif Pemerintah Kab/Kota se Kalteng, Para Pimpinan/Anggota DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota, serta Pejabat di Jajaran Yudikatif Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 3.420 orang yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, 13 kabupaten dan 1 kota berjumlah 1.577 orang, dari Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 2.150 dan ditambah dengan penggembira yang dengan total keseluruhan adalah 4.500 orang.

Rangkaian Kegiatan Kemah terdiri dari kegiatan pribadi (Mandi, makan, ibadah dan keperluan' pribadi lainnya), upacara (Upacara Pembukaan, Upacara Penutupan), Dialog V, api unggun, kegiatan peduli, sunatan, pengobatan gratis, penanaman pohon, donor darah, pengecekan kesehatan, pembersihan pantai, outdoor games dan forum Kemah Ely.

Untuk tahun 2020, akan selenggarakan Jambore Guru se Kalimantan Tengah, KMD bagi Guru SMA/SMK/ SLB, SMP dan SD. Guru SMA/SMK/SLB Kewenangannya ada di Provinsi, untuk itu agar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan

Tengah bersama Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah untuk mempersiapkan rencana kegiatan Jambore Guru dan KMD bagi guru SMA/ SMK/SLB pada tahun 2020. Sedangkan untuk Guru SMP dan SD agar kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama Kwartir Cabang dengan dukungan Bupati/ Walikota untuk mengalokasikan anggaran kegiatan KMD bagi guru yang belum pernah Kursus. Sasaran yang diinginkan adalah

sekolah yang kekurangan tenaga pembina pramuka, sehingga kegiatan kepramukaan di Gugus depan akan lebih maju lagi dan menghidupkan proses pembinaan peserta didik, karena Gugus depan merupakan ujung tombak dalam proses kegiatan kepramukaan.

Suasana kehidupan di perkemahan dirancang dengan penjadwalan kegiatan yang tidak terlalu ketat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pesona untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungan suasana perkemahan dan membina keakraban antar peserta. Kehidupan di Perkemahan ditata sesuai dengan prinsip - prinsip dasar dan metode kepramukaan antara lain satuan terpisah antara peserta putera dan puteri, Suasana persaudaraan dan saling menghormati, suasana ceria, bersahaja ,kemandirian dan swadaya. \*\*\*

## **Alumni Perguruan Tinggi Diharapkan Berkontribusi Pada Pembangunan**

PALANGKARAYA—Biro PKP. Alumni dan almamater sebuah Perguruan Tinggi diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi jalannya roda pembangunan termasuk alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang tergabung dalam Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA), terlebih lagi bagi Pengurus Daerah KAGAMA Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2024 yang baru saja dikukuhkan dan diisi sejumlah Pejabat Daerah Kalimantan Tengah.

Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Gubernur Habib Ismail Bin Yahya mengharapkan kepada Pengurus KAGAMA Periode 2019-2024 agar selalu meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan. "Selamat atas dilantiknya kepengurusan yang baru. Semoga komunikasi dan kerjasama antara sesama anggota maupun antara anggota dengan pemerintah daerah dan masyarakat bisa semakin erat," ucapnya.

Peran alumni dan almamater sebuah Perguruan Tinggi merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan, terlebih ditunjang oleh ikatan dan solidaritas yang kuat berdasarkan kesamaan latar belakang, visi dan misi maupun komitmen dalam memberikan dharma bakti bagi NKRI. "Namun, jangan sampai ikatan itu menjadi jalan yang salah dan dipersepsi

bisa membantu anggota mencapai jabatan melalui cara yang salah," kata Sugianto.

KAGAMA diharapkan semakin solid dan bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai sektor di Kalimantan Tengah. "Hingga pada akhirnya Kalteng BERKAH yakni bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis bisa benar-benar diwujudkan, baik di wilayah perkotaan maupun pelosok perdesaan," papar Gubernur.

Sementara itu Ketua Umum KAGAMA Ganjar Pranowo menyampaikan harapannya kepada seluruh alumni UGM agar dapat membantu pemerintah daerah mengingat alumni UGM bekerja di banyak sektor, dapat menangkap persoalan-persoalan yang ada termasuk di Kalimantan Tengah serta membantu menyelesaiannya. "Kalau tidak bisa, bisa bekerjasama dengan UGM atau bekerjasama dengan perusahaan apapun, sehingga teman-teman KAGAMA bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan," jelas Ganjar Pranowo.

Terkait ditetapkannya Kalimantan Tengah sebagai daerah penyanga Ibukota RI yang baru, Ganjar berharap seluruh perencanaan menyiapkan daerah ini sebagai provinsi penyanga dimulai dari sekarang. "Kalau mereka mulai menyiapkan

dari sekarang, Insya Allah banyak manfaat yang nanti akan bisa diberikan, sehingga harus pro aktif. Alumni UGM harus dapat berpartisipasi," tegasnya.

Pengukuhan Pengurus KAGAMA Periode 2019-2024 itu dilakukan Ketua Umum KAGAMA Ganjar Pranowo yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangka Raya, Jumat malam (8/11/2019).

Sejumlah pejabat yang masuk dalam Susunan Pengurus Daerah KAGAMA Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2019-2024 diantaranya Abdul Razak sebagai Ketua Dewan Penasihat, Riban Satia sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat sedangkan Perdie M. Yosef, Nurul Edy, Sri Suwanto dan beberapa pejabat lainnya sebagai Anggota Dewan Penasihat.

Kemudian pada jajaran Pengurus Harian terdapat Rektor UPR Andrie Elia sebagai Ketua dan Sekretaris Esau Tambang serta Yayah Diasmono Tjokro sebagai Bendahara.

Sebelumnya pada hari yang sama, Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah didampingi Asisten II Setda Kalteng Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy meninjau dan melihat secara langsung kondisi warganya yang bertransmigrasi ke Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Hyang Bana SP.1 di Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan, Jumat siang (8/11/2019).\*\*\*

## Pemprov Kalteng dan UPR Tanda Tangani Nota Kesepakatan Bidang Pendidikan

PALANGKARAYA – Biro PKP. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Universitas Palangka Raya (UPR) menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia serta Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Penandatanganan Nota Kesepakatan yang dilakukan Gubernur Sugianto Sabran dan Rektor UPR Andrie Elia Embang tersebut merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis Ke-56 tahun UPR dan Peringatan Hari Pahlawan 2019 dengan Inspektur Upacara Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang dilaksanakan di Halaman Kantor Rektorat UPR, Senin (11/11/2019).

Selain penandatanganan Nota Kesepakatan juga dilakukan launching Website Tracer Study Alumni UPR atau Website Alumni UPR yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Gubernur didampingi Rektor UPR. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan Beasiswa Bidik Misi kepada 5125 mahasiswa Kalimantan Tengah. Beasiswa tersebut diserahkan secara simbolis kepada 48 mahasiswa dari tiga Perguruan Tinggi yakni UPR, Universitas Muhammadiyah dan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Pemberian beasiswa melalui Program Bidik Misi Kalteng BERKAH kepada mahasiswa S1, S2 dan Mahasiswa Kedokteran itu sebagai salah satu bukti kehadiran pemerintah dalam dunia pendidikan. "Mudah-mudahan bisa berarti buat mahasiswa mahasiswa yang kita anggap orang tuanya ada yang jadi petani karet dan nelayan di sungai-sungai, mudah-mudahan ini bisa membantu," kata Gubernur.

Gubernur pun menyindir rencana pemerintah untuk membantu perbaikan asrama mahasiswa yang ada di Palangka Raya khususnya di Universitas Palangka Raya. Bantuan tersebut belum termasuk bantuan kepada mahasiswa yang kurang mampu senilai 100-200 juta rupiah per Kabupaten/Kota. "Kita harus perhatikan mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di pedalaman yang ekonominya tidak mampu tetapi mereka punya semangat," tegasnya.

Dijelaskannya, ketersediaan dana APBN untuk pendidikan dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembangunan gedung-gedung penunjang dan penyediaan ambulance. "Dana dari APBN ada 87 miliar. Tadi dibilang pak Rektor untuk membangun satu gedung 60 miliar lebih, anggaplah 70-80 miliar. Saya akan bantu, mudah-mudahan bisa selesai tahun 2021 akhir paling lambat," harap Sugianto.

Gubernur menegaskan bahwa orang Kalimantan Tengah harus menjadi tuan rumah di "negerinya" sendiri. "Kita membangun kekuatan ekonomi agar banyak investasi masuk ke Kalimantan Tengah. Tapi kalau SDM-nya orang Kalimantan Tengah tidak siap, ya ujung-ujungnya orang lain mengambil keuntungan itu. Karenanya, kita targetkan orang Kalimantan Tengah wajib menjadi tuan rumah di negerinya sendiri di Kalimantan Tengah," terang Sugianto.

Sugianto Sabran mengingatkan bahwa tantangan bagi lulusan Perguruan Tinggi di era Revolusi Industri 4.0 semakin meningkat dan setiap lulusan

Perguruan Tinggi harus memiliki kompetensi untuk bersaing secara global.

Lulusan Perguruan Tinggi selain dituntut mampu bekerja di instansi pemerintah, perusahaan dan instansi lainnya, juga harus memiliki jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan peluang dari Revolusi Industri 4.0. "Kebanyakan kendala bagi seseorang terutama mahasiswa yang mencoba untuk memulai usaha adalah faktor takut mencoba, keterbatasan modal, inovasi dan niat," jelas Gubernur.

Sugianto juga menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya alumni sakaligus dosen Universitas Palangka Raya Alue Dohong sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. "Apresiasi yang tinggi Saya sampaikan kepada Universitas Palangka Raya karena alumni sekaligus dosen Universitas Palangka Raya telah diangkat menjadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yaitu Bapak Drs. Alue Dohong, M.Sc., Ph.D. Tentunya ini sangat membanggakan sekali bagi kita semua," imbuhnya.\*\*\*



## Ketua TP PKK Kalteng : Jangan Ada Lagi Diskriminasi Anak Berkebutuhan Khusus

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran mengingatkan masyarakat agar tidak diskriminatif terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini disampaikan dalam kunjungannya ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 2 Palangka Raya, Selasa (5/11/2019).

“Kehadiran kami di sini sebagai wujud representasi tanda cinta kasih kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan. Anak-anak ini walaupun berkebutuhan khusus juga punya hak. Kita wajib melindungi mereka, menyayangi mereka. Untuk ke depan saya harap tidak ada lagi diskriminasi untuk mereka,” tegas Ivo Sugianto Sabran.

Kunjungan Ketua TP PKK Kalimantan Tengah beserta rombongan ke SLB Negeri 2 Palangka Raya tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Anak Nasional tahun 2019 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Ivo Sugianto Sabran mengajak masyarakat agar terus meningkatkan keharmonisan dan ketahanan keluarga karena sangat berdampak bagi perkembangan anak. “Saya yakin keluarga yang kuat dan harmonis akan membentuk karakter anak-anak dengan masa depan yang cerah,” jelasnya.

Istri orang nomor satu di Kalimantan Tengah itu pun memberikan apresiasi kepada

para pengajar di SLB Negeri 2 Palangka Raya. “Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada guru dan kepala sekolah. Luar biasa sekali ketulusan hati mereka mengajar di SLB ini (tempat) anak-anak berkebutuhan khusus yang jauh dari kota, jalannya juga lumayan (sulit),” imbuhnya.

Pada kunjungan tersebut Ketua TP PKK Kalteng Ivo Sugianto Sabran menyerahkan bantuan buku pelajaran dari Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah secara simbolis kepada Kepala SLB Negeri 2 Palangka Raya serta membagikan coklat dan melihat hasil karya atau kerajinan tangan siswa-siswi SLB Negeri 2 Palangka Raya.\*\*\*

## Ivo Sugianto Sabran Tegaskan Tak Ada Labelling Pada Anak-anak Binaan LPKA

PALANGKA RAYA – Biro PKP. Anak-anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diharapkan tidak mendapatkan labelling ketika kembali ke masyarakat. Hal ini mengemuka dalam kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran ke LPKA Kelas II Palangka Raya di Kompleks Lapas Kelas II A Jalan Tjilik Riwut Km. 2,5 Palangka Raya, Selasa (5/11/2019).

“Ke depan diharapkan tidak ada diskriminasi terhadap mereka, tidak ada labelling terhadap mereka. Mereka bisa kembali ke masyarakat dengan keterampilan yang selama ini diberikan di LPKA. Yang penting kesalahan yang pernah dilakukan dijadikan sebagai evaluasi ke depannya, jangan diulangi lagi,” terang Ivo

Sugianto Sabran.

Kehadiran Ketua TP PKK Kalimantan Tengah dan rombongan ke LPKA Kelas II Palangka Raya ini untuk bersilaturahmi dengan anak-anak dan pengelola LPKA dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2019. “Anak-anak binaan di sini merupakan bagian dari anak-anak Indonesia yang sudah sepantasnya disayangi dan dilindungi. Sebagaimana tema Hari Anak Nasional tahun ini, Saya mengimbau kita harus meningkatkan keharmonisan dan ketahanan keluarga agar berdampak positif untuk perlindungan dan masa depan anak-anak kita,” jelas Ivo.

TP PKK Kalimantan Tengah menawarkan pelatihan

menganyam dengan mengirimkan pelatihan dari Dekranasda Kalimantan Tengah untuk melakukan pembinaan anak-anak di LPKA. Selain itu, TP PKK Kalimantan Tengah juga siap memfasilitasi kegiatan berkebun sekaligus mendatangkan penyuluhan. “Untuk fasilitas tempat ibadah, nanti coba saya koordinasikan dengan Bapak Gubernur supaya pihak yang terkait bisa menindaklanjuti keperluan adik-adik di sini,” imbuh Ivo.

Dalam kesempatan tersebut Ivo Sugianto Sabran menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada 6 perwakilan anak serta sejumlah bantuan lainnya berupa buku bacaan anak dan alat-alat olahraga.

Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah Ilham Djaya berharap ijazah anak-anak setelah keluar dari LPKA tidak

ada perbedaan dengan ijazah pada umumnya atau tanpa mencantumkan label LPKA agar mereka tidak menderita dan menjadi korban bullying. Hal itu untuk menghilangkan labelling yang kerap diterima anak-anak setelah keluar dari LKPA. "Mereka nanti ujiannya di sekolah-sekolah. Jadi mereka ini murid sekolah itu, bukan murid dari LPKA. Hanya tempat tidur dan rumahnya saja di sini. Ini bukti kehadiran negara," jelasnya.

Ilham Djaya juga menegaskan KIA merupakan hak anak-anak.

"Itu KTP. Mereka tidak akan mendapatkan reward dari negara kalau tidak ada KIA. Bagaimana mereka mau mendapatkan bantuan kalau tidak ada KIA," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Dinas P3AP2KB dr. Rian Tangkudung menjelaskan apabila Kalimantan Tengah ingin menjadi Provinsi Layak Anak, maka hak sipil adalah nomor satu. "Di Kota/Kabupaten Layak Anak, indikator nomor satu adalah hak sipil, identitas dan tercatat sebagai warga negara. Kalau dia tidak memiliki hak

sipil, mudah sekali jadi korban perdagangan manusia. Human Trafficing kebanyakan menimpakan orang yang tidak tercatat," jelasnya sembari menambahkan saat ini ada 2 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah yang sudah mendapatkan label Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tahun depan diharapkan seluruh 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah mendapatkan label Kabupaten/Kota Layak Anak sehingga Kalimantan Tengah secara otomatis dapat menjadi Provinsi Layak Anak.\*\*\*

### Aisyiyah Diharapkan Ambil Bagian dalam Wujudkan Kalteng Berkah

PALANGKA RAYA – Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Nurul Edy membuka Seminar Nasional Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Kalimantan Tengah di Aula Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Jumat (29/11/2019).

Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Milad 'Aisyiyah ke-105 dan satu abad TK 'Aisyiyah Bustanul Athfah (ABA) ini mengambil tema "Aktualisasi Risalah Pencerahan untuk Dakwah Melintas Batas".

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dalam sambutan yang dibacakan Asisten II berharap, dengan diselenggarakannya Seminar Nasional 'Aisyiyah di Palangka Raya, organisasi Perempuan Muhammadiyah ini dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional dan daerah. "Khususnya

di bidang sosial dan keagamaan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan kualitas pelayanan dan pemahaman agama dalam kehidupan masyarakat," jelasnya.

Pada bagian lain, Gubernur berharap kontribusi bagi masyarakat Kalimantan Tengah dapat diberikan dalam rangka turut mewujudkan Kalteng Berkah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini berharap 'Aisyiyah mempertahankan atau meningkatkan peran memajukan harkat perempuan. "Peran ini harus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan guna mengaktualisasikan kiprah Perempuan 'Aisyiyah melalui pengajian dan dakwah," imbuhnya.

Sementara itu, berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati

dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Gubernur berharap hal tersebut disikapi secara arif dan bijak. "Kedepankan kedewasaan politik, junjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta ciptakanlah suasana aman dan damai di lingkungan masing-masing," ajak Gubernur Sugianto Sabran.

Selain Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, pembukaan Seminar Nasional 'Aisyiyah kali ini, antara lain juga dihadiri Ketua Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Latifah Iskandar Husein, Ketua Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Kalimantan Tengah Nurhayati, dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Ahmad Syari'i.

Sementara itu, di samping Seminar Nasional, peringatan Milad juga dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada guru-guru TK ABA Kalimantan Tengah pengabdian 10 tahun ke atas.\*\*\*

## **Wagub Temui Pengunjuk Rasa Menentang Penutupan Ruas Jalan Di Barito Timur**

Palangka Raya – Biro PKP. Masyarakat menggelar unjuk menentang penutupan ruas jalan Pertamina yang dilakukan oleh PT. Patra Jasa anak Perusahaan PT.Pertamina di Desa Jaweten Kecamatan Kabupaten Barito Timur.

Penutupan ruas jalan Pertamina oleh PT Patra Jasa anak Perusahaan PT. Pertamina itu sebagai salah satu upaya meningkatkan optimalisasi kinerja perusahaan. Namun penutupan ruas jalan itu mendapat reaksi pro dan kontra antara pihak Pertamina dan Asosiasi Angkutan Batu Bara Barito Timur serta sejumlah perusahaan yang menggunakan jasa angkutan batu bara atau menggunakan jalan tersebut untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan batu bara.

Wakil Gubernur Habib Yahya Bin Ismail ketika menemui para pengunjuk rasa yang menginginkan ruas jalan tersebut dibuka kembali pada Selasa (15/10/2019) meminta kepada PT Patra Jasa untuk membuka kembali jalan Pertamina tersebut. "Pemerintah wajib hadir di tengah-tengah masyarakat. Makanya kami datang ke sini dan meminta kepada PT.Patra Jasa agar ruas jalan itu dibuka hari ini. Hari Kamis kami akan mengadakan pertemuan dengan PT.Patra Jasa,

PT.Rimau dan mungkin PT-PT yang lain untuk membicarakan tindak lanjutnya bagaimana," kata Wagub seraya menjelaskan bahwa pertemuan dilakukan di Kantor Gubernur secara tertutup dan hasilnya akan segera dipublikasikan.

Dijelaskan, Pemerintah Provinsi sudah menyurati PT. Pertamina Pusat untuk mengetahui status jalan tersebut apakah masih akan dikelola oleh perusahaan plat merah atau diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten. "Itu akan kita lihat tatkala pertemuan dengan Pertamina Pusat dan juga Kementerian Keuangan," imbuhan Wagub.

Habib Ismail seusai menemui para pengunjuk rasa, mengadakan pertemuan dengan pimpinan PT. Rimau Grup secara tertutup di Kantor Rimau Grup dan dilanjutkan pertemuan dengan Wakil Bupati Barito Timur dan Asisten III Sekda Barito Timur di Kantor Bupati setempat untuk mendengarkan informasi dari beberapa pihak yang terkait dengan masalah tersebut. "Karena ini sudah termasuk sesuatu yang meresahkan masyarakat sampai ada demo-demo. Jadi kami pengen melihat dan juga pengen dengar dari masyarakat serta dari pemerintah. Juga kita akan bertemu dengan perwakilan-perwakilan

perusahaan," jelas Wagub.

Wagub menambahkan, pihaknya juga akan memanggil Pertamina dan perusahaan-perusahaan yang lain untuk duduk bersama membicarakan masalah ini agar produktivitas Sumber Daya Alam di Kabupaten ini tetap berjalan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Jadi andaikata itu ditutup, tentu semuanya akan mangkrak, macet dan juga tidak akan bagus untuk perekonomian kita, khususnya karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan batubara yang memang cuma mengandalkan jalan itu. Tentunya andaikata itu tutup, tidak bisa ngangkut, berarti ada PHK dan yang di-PHK adalah masyarakat kita. Kita akan mencari win-win solution, jalan keluar yang terbaik yang tidak merugikan pihak manapun," jelasnya.

Habib Ismail juga menyayangkan kemungkinan Jalan Pertamina itu dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten sebagaimana peraturan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Dalam pengaturan HPH disebutkan apabila perusahaan pemegang HPH sudah berhenti beroperasi, maka secara otomatis hak tersebut diserahkan kembali kepada Pemerintah. "Banyak jalanan kita yang bekas HPH. Kita mengharapkan Pertamina juga seperti itu," kata Wagub.\*\*\*

## **PT.IJTS Pastikan Perbaikan Fender Jembatan Kalahien Akhir Oktober 2019.**

Palangka Raya – Biro PKP. Pengaman Utama (Fender) Jembatan Kalahien yang melintasi Sungai Barito Kabupaten Barito Timur yang roboh ditabrak tongkang batubara milik PT. Indo Jaya Trans Samudra April lalu, kini sudah mendapat kepastian perbaikannya akhir Oktober 2019.

Wakil Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya dan Pj. Sekda Barito Timur Syahrani beserta sejumlah pimpinan instansi terkait ketika melakukan peninjauan jembatan Kalahien, Selasa (15/10) menjelaskan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu lima bulan terakhir terus mendesak PT. IJTS agar melakukan perbaikan sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. "Kami mendesak kepada pihak yang bertanggung jawab karena sudah menyebabkan ini terjadi. Kami minta perbaikan secepatnya,

jangan sampai molor-molor," jelas Wagub.

Kepastian perbaikan fender jembatan Kalahien tersebut diketahui setelah PT. Indo Jaya Trans Samudra menyatakan komitmenya dengan pihak ketiga selaku penyedia atau kontraktor. "Alhamdulillah dari rapat kemarin sudah ada keputusan. Mereka siap dan hari ini mereka sedang mengadakan rapat dengan pihak ketiga atau rekanan yang mungkin akan ditunjuk menjadi pelaksana pekerjaan merehab atau membangun fender jembatan di Kalahien," terangnya.

Pemprov Kalteng akan memberikan teguran keras dengan menutup lalu lintas tongkang di bawah Jembatan Kalahien apabila fender jembatan tidak segera diperbaiki mengingat sebentar lagi musim hujan dan alur Sungai Barito akan naik. "Jangka waktu mereka kalau vendor itu seminggu, cuma pelaksanaannya sekitar 1 bulan, paling lama 1 bulan setengah.

Seandainya teledor, kita akan tindak, ada sanksi," tegas Wagub Habib Ismail.

Pj. Sekda Barito Timur Syahrani menyatakan pemerintah Kabupaten Barito Timur mendukung sikap tegas pemerintah provinsi terkait pengaturan dan pengawasan jembatan Kalahien mengingat fender jembatan tersebut sangat vital untuk mengamankan tiang fondasi jembatan yang merupakan jalur lalulintas Daerah Aliran Sungai Barito menuju Palangka Raya..

Pemkab Barito Timur juga mendukung kebijakan pemerintah Provinsi Kalteng yang akan memberikan shock therapy bagi perusahaan yang menabrak fender jembatan tersebut jika tidak segera melakukan perbaikan. Shock therapy itu dengan menutup sementara lalu lintas tongkang yang melintas di bawah jembatan Kalahien.\*\*\*

# RAPAT KOORDINASI DAERAH

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)  
KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH  
DI KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019

TERIMA  
HIDUP RUKUN DALAM PERBEDAAN

SUB TEMA:

Mari kita singgahlah Kankukungan Umat Budayamu dalam meningkatkan stabilitas daerah deini menuju pihakku; danmu tahun 2020 menuju Kalimantan Berkah

